

## RESOLUSI KONFLIK DI ASIA (Analisis Perbandingan Aceh dan Sri Lanka)

Putri Marzaniar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup>Contributor Email: [putrimarzaniar98@gmail.com](mailto:putrimarzaniar98@gmail.com)

### Abstract

*The conflicts in Aceh and Sri Lanka share many similarities. However, there have been significantly different post-tsunami dynamics of conflict resolution in Aceh and Sri Lanka. In this article, the conflict resolution processes in Aceh and Sri Lanka will be compared. The main goals of this article are to (1) identify the main factors that failed to resolve the Sri Lanka conflict and the main factors that contributed to the successful post-tsunami resolution of the Aceh conflict, and (2) to determine whether the Sri Lanka conflict's failure to be resolved will repeat in Aceh if Aceh is faced with a similar natural disaster (tsunami). This article uses a qualitative approach with multiple case studies. As a result, the author uses a scientific model that includes additional concepts, expert opinions, and theories about conflict resolution to comprehend and analyze the resolution of the Aceh conflict and the conflict in Sri Lanka. These findings demonstrate that the success or failure of post-disaster resolution in two areas depends critically on the level of trust between conflicting parties. As a reaction, the violations of the Helsinki Accords' terms are more likely to trigger a third wave of conflicts than future natural disasters In Aceh.*

**Keywords:** *Conflict Study, Conflict Resolution Analysis, The Aceh Conflict, The Sri Lanka Conflict, Comparative Study of Conflict*

### A. Pendahuluan

Konflik merupakan fenomena alamiah yang tidak bisa dihindarkan, pernyataan tersebut disampaikan oleh Nader dalam (Bekelcha, 2019). Pandangan Nader sejalan dengan pandangan interaksionis dari (Robbins & Judge, 2013) yang memandang bahwa konflik diperlukan agar terciptanya perubahan dan inovasi. Konflik atau persengketaan atas isu-isu publik datang dari berbagai ukuran dan bentuk, terjadi antara masyarakat dengan pengambil keputusan, antar faksi dalam pemerintahan, antar organisasi, dan antara organisasi dan masyarakat (Carpenter & Carpenter, 2001).

Konflik Aceh dan Konflik Sri Lanka merupakan konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat dengan *central government*. Konflik Aceh sebenarnya sudah terjadi dari masa

pemerintahan Soekarno yang dipimpin oleh Daud Bereueh karena kekecewaannya terhadap janji Soekarno pasca kemerdekaan yang tidak dipenuhi terkait legalitas pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu, sejak diproklamasikannya “Aceh Merdeka” oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipelopori Muhammad Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 dapat dikatakan sebagai konflik Aceh gelombang ke-2.

Pemberontakan di Aceh dilakukan terhadap Pemerintah Indonesia atas tuntutan janji Soekarno terhadap Aceh dalam pengakuan pelaksanaan Syariat Islam, serta diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan selama pemerintahan Soeharto. Konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia berakhir pasca tsunami melalui perundingan damai yang dimediasi oleh Presiden Firlandia, Martti Ahtisaari di Helsinki pada 15 Agustus 2005 (Miller & Bunnell, 2013).

Sedangkan konflik Sri Lanka, dimulai sejak *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) yang digagas oleh Velupillai Prabhakaran pada 1975 menuntut kemerdekaan atas etnis tamil kepada pemerintahan Sri Lanka. Eskalasi konflik Sri Lanka terjadi ketika LTTE melakukan serangan dan membakar 600 orang anti-tamil pada 1983 (Srikandi, 2011). Penyelesaian konflik Sri Lanka telah dilakukan mulai dari *hard power* (operasi militer) sampai dengan *soft power* melalui jalur mediasi pada awal Februari 2002 dengan mediator seorang diplomat Norwegia yaitu Eric Solheim (Srikandi, 2011).

Hasil perundingan menghasilkan perjanjian gencatan senjata antara LTTE dan pemerintah Sri Lanka. Namun kesepakatan ini tidak berlangsung lama, re-eskalasi konflik terjadi pasca tsunami. Meskipun kedua konflik tersebut terdapat di dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Sri Lanka, namun keduanya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang mencolok dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Konflik Aceh dan Sri Lanka<sup>1</sup>**

Karakteristik	Aceh	Sri Lanka
Isu konflik (Separatisme)	Nasionalisme Aceh (menuntut hak otonomi atas daerahnya)	Nasionalisme Etnis Tamil (menuntut hak otonomi atas daerahnya)
Jenis Konflik (Vertikal)	Gerakan Aceh Merdeka Vs Pemerintah Indonesia	Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) Vs Pemerintah

<sup>1</sup> Tabel ini disusun berdasarkan *policy conflict framework* dalam menggambarkan jenis, bentuk, watak, dan moralitas konflik Aceh dan konflik Sri Langka

Karakteristik	Aceh	Sri Lanka
		Sri Lanka
Alasan pemberontakan	Diskriminasi dan ketidakadilan distribusi terhadap eksploitasi SDA Aceh, tuntutan keberlangsungan Aceh sebagai sebuah daerah yang memiliki andil dalam bidang politik, sosial, budaya dan warisan agama, serta pelanggaran HAM oleh militer Indonesia	Diskriminasi, dan penganiayaan terhadap Etnis Tamil oleh Pemerintah Sri Lanka yang didominasi oleh Etnis Sinhala.
Watak konflik	<i>Ideological</i> dan pragmatis, namun dominan pada <i>ideological</i> .	<i>Ideological</i>
Bentuk konflik	<i>Open participatory (direct and non-direct)</i> <i>Direct</i> : Adu senjata <i>Non-direct</i> : Membangun hubungan diplomasi untuk mencari dukungan Internasional atas kemerdekaan Aceh	<i>Open participatory (direct and non-direct)</i> <i>Direct</i> : Adu senjata <i>Non direct</i> : Membangun hubungan diplomasi
Temporarity	<i>Long term</i>	<i>Long term</i>
Dampak konflik	Sekitar 15.000 korban konflik	Sekitar 100.000 korban konflik
Event ( <i>window of oppourtinity</i> )	Tsunami Samudera Hindia: 26 Desember 2004	Tsunami Samudera Hindia: 26 Desember 2004
Dinamika konflik pasca bencana (Tsunami)	Membawa perdamaian (perundingan di Helsinki)	Merusak hasil perundingan awal yang dimediasi oleh Norwegia (kesepakatan gencatan senjata) yang dibangun pada tahun 2002.

**Sumber:** (Klitzsc, 2014) (Sinulingga, Halim, & Nasir, 2020) (Srikandi, 2011)

Berdasarkan tabel di atas terlihat, konflik Aceh dan konflik Sri Lanka memiliki banyak kesamaan, namun dinamika penyelesaian konflik pasca tsunami yang dicapai keduanya berbeda secara signifikan. Penelitian (Sinulingga, Halim, & Nasir, 2020) menunjukkan Tsunami pada 26 Desember 2004 membuka peluang bagi pihak yang bertikai (GAM dan RI) untuk melakukan perundingan yang dimediasi oleh Presiden Firlandia.

Sementara tsunami di Sri Lanka membawa kondisi destruktif yang memperkeruh tendensi konflik pasca perjanjian gencatan senjata dan memicu re-eskalasi konflik antara LTTE dan Pemerintah Sri Lanka. Realita ini sejalan dengan pandangan (Klitzsc, 2014) yang menyatakan bahwa bencana dapat menjadi katalisator terhadap dinamika konflik, khususnya dalam membawa perdamaian.

Berbeda dengan (Slettebak, 2012) hasil penelitiannya menunjukkan adanya korelasi positif antara bencana alam dengan peningkatan tendensi konflik. Jika dihubungkan pandangan Klitzsc dan Slettebak maka dapat dipahami bahwa *natural disaster* sebenarnya dapat membawa dua kondisi terhadap dinamika konflik, yaitu konstruktif (membawa harmonisasi bagi kedua pihak yang berkonflik) dan destruktif (sebagai pemicu yang memperburuk kondisi konflik). Penelitian Sinulingga telah membuktikan kedua pandangan tersebut dari fenomena konflik Aceh yang membawa kondisi konstruktif dan konflik Sri Lanka membawa kondisi destruktif.

Namun penelitian Sinulingga tidak menjelaskan resolusi konflik pada kedua daerah tersebut pasca tsunami. Sehingga penelitian tersebut tidak mampu menjelaskan faktor utama yang menyebabkan re-eskalasi konflik Sri Lanka dan de-eskalasi konflik Aceh pasca tsunami. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam terkait perbandingan proses resolusi konflik Aceh dan konflik Sri Lanka dengan tujuan:

- 1) Untuk mengidentifikasi faktor utama yang mendasari kegagalan resolusi konflik Sri Lanka dan keberhasilan resolusi konflik Aceh pasca tsunami.
- 2) Untuk mengetahui kemungkinan kegagalan penyelesaian konflik Sri Lanka terulang pada konflik Aceh jika dihadapkan dengan bencana alam ke dua di masa yang akan datang.

Kemudian dalam memahami dan menganalisa proses resolusi konflik Aceh dan konflik Sri Lanka, penulis mengacu pada beberapa teori maupun konsep, yang pada akhirnya penulis dan pembaca dapat memperoleh *lesson learn* dari proses resolusi konflik Aceh dan konflik Sri Lanka.

## B. Metode

Resolusi konflik merupakan studi yang dikenal dengan notabene kajiannya yang cukup kompleks dan cenderung memiliki motif yang bersifat tersembunyi. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *multiple case studies*. Merujuk pada pandangan (Creswell, 2007, p. 44) menyampaikan bahwa metode ini dimulai dengan asumsi interpretatif yang menghasilkan informasi terkait masalah penelitian. Masalah penelitian ini dapat dikaji dengan mengeksplorasi data, cerita, makna dari sekelompok orang yang termasuk subjek dari masalah yang terjadi.

Berdasarkan pada pandangan Creswell di atas peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi faktor penentu kegagalan dan keberhasilan resolusi konflik di Asia dengan mengkomparasikan antara konflik Aceh dan konflik Sri Lanka. Kemudian pendekatan *multiple case studies* merupakan pendekatan penelitian yang sering dimanfaatkan untuk meneliti peristiwa, dinamika, kegiatan atau proses tertentu di kehidupan nyata (Creswell, 2007, p. 97). Disamping itu entitas yang diidentifikasi dan diteliti dalam penelitian ini adalah entitas non konkrit yaitu proses resolusi konflik pada dua lokasi yang berbeda.

Pengumpulan informasi/data terhadap resolusi konflik di dua lokasi tersebut akan mengacu pada studi Pustaka. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data emperis. Data terdahulu dari beberapa penelitian sebelumnya, baik itu kutipan wawancara, cerita penulis, data time series, dan seluruh data lapangan yang ada akan dimanfaatkan untuk menganalisis resolusi konflik di Aceh dan Sri Lanka. Kemudian peneliti juga akan menggunakan *scientific model* untuk menganalisis data. *Scientific model* adalah model analisis data yang mengacu pada data fisik/matematis/konsep dari suatu ide, peristiwa atau proses. Jadi model ini sering digunakan oleh para ahli untuk memahami sebuah fenomena dengan baik berdasarkan pada informasi yang beragam yang berasal dari berbagai sumber (Cartier, Rudolph, & Stewart, 2001).

### C. Hasil dan Pembahasan

Konflik Aceh jika dilihat dari dua mekanisme penyelesaian konflik yaitu konvensional dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), maka dapat diketahui bahwa resolusi konflik Aceh pasca tsunami termasuk dalam jenis penyelesaian konflik ADR, terlihat dari jalur resolusi yang dipilih yaitu mediasi yang difasilitasi oleh Presiden Firlandia, Martti Ahtisaari di Helsinki pada 15 Agustus 2005 (Miller & Bunnell, 2013). Mediasi menurut (Brown, Cervenak, & Fairman, 1998) merupakan salah satu cara penyelesaian konflik ADR.

Upaya penyelesaian konflik Aceh telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mulai dari masa pemerintahan Soeharto hingga Megawati, mulai dari *hard power* sampai *soft power*. Namun upaya-upaya tersebut gagal menyelesaikan konflik Aceh. Dapat dilihat dari

masa pemerintahan Soeharto, yang memilih koersi sebagai strategi penyelesaian konflik Aceh melalui penetapan daerah operasi jaring merah. Metode ini gagal menyelesaikan konflik Aceh, sebaliknya semakin memperkeruh dinamika konflik Aceh setelah banyak dari GAM dan warga sipil yang menjadi korban pembunuhan dan kriminalisasi dari militer Indonesia.

Menurut amatan penulis penetapan koersi dalam penyelesaian konflik Aceh seharusnya dilakukan pada awal pemberontakan Aceh. Karena jika melihat dari tujuan koersi sebagaimana yang disampaikan oleh Herbst dalam (Fjelde & Soysa, 2009) untuk menekan atau memaksa pihak lawan untuk menyerah (menghentikan konflik) dengan memanfaatkan kemampuan polisi dan militer. Upaya menekan atau memaksa pihak lawan seharusnya dilakukan ketika kekuatan lawan sedang lemah atau tidak berdaya, seperti pada awal pemberontakan GAM (1976) yang mana pada saat itu GAM tidak memiliki pasokan senjata maupun dukungan dari negara luar (Libya) (Jayanti, 2013). Sedangkan pada masa ditetapkannya DOM pada tahun 1990, posisi kedua pihak yang bertikai sama-sama kuat dan dipersenjatai dengan senjata lengkap. Sehingga dampaknya semakin memperburuk kondisi konflik bahkan menimbulkan korban jiwa.

Kemudian pemberian otonomi khusus Aceh pertama melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada masa pemerintahan Habibie juga gagal menyelesaikan konflik Aceh, karena tidak secara komprehensif menyebutkan bentuk-bentuk keistimewaan Aceh dan dianggap tidak serius dalam menangani konflik Aceh. Kekecewaan Rakyat Aceh semakin berlarut dan hubungan RI dan GAM semakin memburuk.

Selain itu hasil kesepakatan dari perundingan RI dan GAM pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang berupa jeda kemanusiaan (Wahyuni, Isjoni, & Ibrahim, 2016) juga gagal menyelesaikan konflik Aceh. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati dikeluarkannya UU Nomor 18 tahun 2001 sebagai perbaikan dari UU Otonomi Khusus pertama. Namun UU ini dari segi *type of benefit* (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994), hanya menguntungkan Pemerintah Indonesia secara dominan, khususnya dalam perihal distribusi pendapatan dari SDA Aceh, dapat dilihat dari pembagian bagi hasil SDA Aceh yang tercantum dalam pasal 4 Ayat 3 UU Nomor 18 tahun 2001 disebutkan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi sebesar 15% dan pertambangan gas

alam sebesar 30% untuk pemerintah Aceh. UU tersebut juga gagal membawa perdamaian konflik Aceh. Pada akhirnya Megawati memutuskan menggunakan metode koersi pada masa Soeharto dalam penyelesaian konflik Aceh dengan menetapkan kembali DOM di Aceh (Wahyuni, Isjoni, & Ibrahim, 2016). Keputusan Megawati ini semakin memperparah dinamika konflik Aceh yang terjadi sebelumnya.

Padahal Snouck C. Hurgronje (1906) dalam (Lan, Patji, Soewarsono, Istiani, & Nurhasim, 2005) sudah memperingatkan bahwa Aceh tidak dapat ditaklukkan dengan cara kekerasan, tetapi dengan metode lembut/halus. Menurut (Lan, Patji, Soewarsono, Istiani, & Nurhasim, 2005) tumbuhnya separatisme di Aceh salah satunya dipicu oleh kesalahan penanganan konflik yang dilakukan pada masa Orde Baru dan menurut penulis kesalahan tersebut berlanjut sampai masa pemerintahan Megawati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegagalan resolusi konflik Aceh pra tsunami disebabkan oleh kesalahan dalam pemilihan strategi penyelesaian konflik Aceh dari masa pemerintahan Soeharto sampai Megawati yang semakin memperkeruh dan memperburuk hubungan GAM dan RI, serta menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah RI.

Kebuntuan GAM dan Pemerintah Indonesia pada akhirnya dapat teratasi pasca tsunami. Tsunami pada saat itu dapat disebut sebagai *blessing in disguise* yang mempertemukan kedua pihak yang bertikai untuk saling berunding dalam menyepakati kesepakatan damai yang berorientasi pada *win-win solution* atau lebih tepatnya berdasarkan pada konsensus bersama. Menurut (Yani & Siti Mutiah Setiawati, 2018) perundingan damai pasca tsunami dapat terselenggara karena pasca tsunami kekuatan GAM menjadi lemah, disebabkan oleh keterpurukan Aceh yang membutuhkan bantuan kemanusiaan skala besar. Pemerintah Indonesia memanfaatkan *event* tersebut dengan mempersiapkan jalan menuju negosiasi. Strategi mendasar yang dilakukan adalah mempertahankan kekuatan militer dengan mendorong pihak GAM untuk bersedia berdamai. Dalam mendesak GAM tersebut, TNI menghalangi penyaluran bantuan pasca tsunami. Pemerintah juga mengatur sebuah pertemuan rahasia untuk menawarkan kompensasi ekonomi dan politik bagi para pemimpin GAM (Yani & Siti Mutiah Setiawati, 2018). Kondisi masyarakat Aceh yang cukup tragis pasca tsunami menjadi salah satu

alasan pemimpin GAM yaitu Hasan Tiro menerima tawaran perdamaian dari Pemerintah Indonesia dan menyetujui kesepakatan gencatan senjata pasca tsunami.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa resolusi konflik Aceh pasca tsunami dapat berlangsung karena adanya kepercayaan dan keinginan antar kedua pihak yang bertikai untuk berdamai. Meskipun pada faktanya kepercayaan tersebut adalah kepercayaan yang dipaksakan oleh kondisi, tapi membuahkan hasil yang jauh lebih baik dari pada resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Hasil resolusi konflik yang dicapai pasca tsunami berhasil membawa konflik Aceh sampai tahap transformasi konflik. Bahkan tsunami kedua yang melanda Aceh pada tahun 2016 yang terpusat di Pidie Jaya sama sekali tidak memunculkan tendensi konflik lama, bahkan mempererat hubungan antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan Pusat dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Pidie Jaya.

Kemudian upaya penyelesaian konflik Sri Lanka, menurut (Sinulingga, Halim, & Nasir, 2020) periode 2000-2005 merupakan tahap penting dalam proses resolusi konflik Sri Lanka. Sama halnya dengan konflik Aceh, mekanisme penyelesaian konflik yang ditempuh Sri Lanka adalah ADR, terlihat dari jalur mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak pada tahun 2000. Sebelum periode tersebut penyelesaian konflik yang dipilih adalah koersi dengan jalan kekerasan (operasi militer). Pada tahun 1998 pemerintah Sri Lanka menyadari bahwa kekerasan tidak dapat menyelesaikan konflik, bahkan memperburuk dan merugikan negara.

Pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian konflik, dengan mediator seorang diplomat Norwegia yang bernama Eric Solheim. Setelah Eric Solheim melakukan pendekatan dengan kedua belah pihak yaitu Presiden Sri Lanka dan pemimpin LTTE, akhirnya keduanya sepakat untuk melakukan perundingan pada tahun 2000.

Upaya penyelesaian konflik Sri Lanka mencapai titik terang pada tahun 2002, dengan disepakatinya kesepakatan gencatan senjata pada 22 Februari 2002 oleh pemerintah Sri Lanka diwakili oleh Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan Velupillai Prabhakaran selaku pimpinan LTTE. Untuk mengawasi pelaksanaan MoU tersebut dibentuklah Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) yang beranggotakan Norwegia, Swedia, Irlandia, Denmark dan Islandia (Srikandi, 2011).

Pelanggaran kesepakatan gencatan senjata oleh LTTE dan pemerintah Sri Lanka yang berupa penculikan, rekrutmen anak-anak, pembunuhan (Sinulingga, Halim, & Nasir, 2020) telah berdampak negatif pada iklim negosiasi yang menurunkan rasa kepercayaan antar kedua belah pihak. Maka dari itu pada tahap negosiasi perundingan yang dilakukan sebanyak 6 kali gagal membawa hasil yang positif. Jika mengacu pada teori resolusi konflik dalam (Rupesinghe, 1987) gencatan senjata hanya langkah awal dari tahap de-eskalasi. Dengan kata lain memiliki kemungkinan besar untuk memicu re-eskalasi konflik kembali. Maka kesepakatan gencatan senjata Sri Lanka rentan terhadap re-eskalasi jika tidak dijaga dengan baik.

Disamping itu (Lan, Patji, Soewarsono, Istiani, & Nurhasim, 2005) juga menyampaikan pasca kesepakatan damai tidak menutup kemungkinan hasil kesepakatan tersebut akan menjadi lembaran kosong jika butir-butir perjanjian tidak direalisasikan sebagaimana mestinya oleh pihak yang bertikai. Kondisi demikianlah yang terjadi di Sri Lanka pasca tsunami, pemerintah yang menandatangani proses perdamaian dilengserkan dari jabatannya dan pemerintah baru membatalkan perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati pada tahun 2002 (Sinulingga, Halim, & Nasir, 2020). Kondisi tersebut memicu re-eskalasi konflik Sri Lanka pasca tsunami. Penyelesaian konflik dicapai setelah pemerintah Sri Lanka memperoleh kemenangan dengan menggulingkan pimpinan LTTE yaitu Velupillai Prabhakaran dalam perang senjata yang terjadi pada Mei 2009 (Gayatri, Priadarsini, & Nugraha, 2018).

#### **D. Penutup**

Tingkat kepercayaan antarpihak yang berkonflik merupakan faktor penentu kegagalan dan keberhasilan resolusi konflik di kedua daerah tersebut pasca tsunami. Kegagalan resolusi konflik Sri Lanka disebabkan oleh pembatalan perjanjian gencatan senjata oleh pemerintahan baru Sri Lanka pada tahun 2005, yang disebabkan oleh ketidakpercayaan pemerintahan Sri Lanka terhadap LTTE yang melakukan pelanggaran perjanjian gencatan senjata pertama kalinya setelah perundingan. Sedangkan keberhasilan resolusi konflik Aceh yang membawa de-eskalasi konflik, terjadi karena kepercayaan dan keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik pasca tsunami dan loyalitas kedua belah pihak dalam menjaga perdamaian Aceh.

Kemudian pelanggaran dan pengkhianatan terhadap butir-butir MoU Helsinki akan lebih cenderung menimbulkan potensi konflik gelombang ke-3 di Aceh dari pada bencana alam dimasa yang akan datang, dapat dilihat dari tsunami kedua yang melanda Aceh pada tahun 2016 yang berpusat di Pidie Jaya sama sekali tidak memunculkan tendensi konflik. Namun sebaliknya mempererat hubungan antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan Pusat melalui pengelolaan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Pidie Jaya. Kemudian *lesson learn* dari perbandingan proses resolusi konflik Aceh dan Sri Lanka dalam paper ini berupa: “Kepercayaan dan keinginan berdamai dari dua pihak yang berkonflik adalah kunci keberhasilan Mediasi dalam resolusi konflik”.

#### Referensi:

- Bekelcha, K. L. (2019). Conflict Theories. *Global Journal of Religions*, 1(4), 1-8. doi:10.28933/GJR
- Brown, S., Cervenak, C., & Fairman, D. (1998, March). *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PRACTITIONERS GUIDE*. Retrieved from GSDRC: <https://gsdrc.org/docs/open/ssaj1.pdf>
- Carpenter, S. L., & Carpenter, S. L. (2001). *Managing Public Disputes: A Practical Guide for Government, Business, and Citizens' Groups*. New York: Jossey Bass.
- Cartier, J., Rudolph, J. L., & Stewart, J. (2001). *The Nature and Structure of Scientific Models*. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461513.pdf>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry Reseach Design: choosing among five approaches* (3rd ed ed.). United States of America: SAGE publication.
- Fjelde, H., & Soysa, I. D. (2009). Coercion, Co-optation, or Cooperation? State Capacity and the Risk of Civil War, 1961-2004. *Conflict Management and Peace Science*, 26(1), 05-25. doi:10.1177/0738894208097664
- Gayatri, N. E., Priadarsini, N. W., & Nugraha, A. B. (2018). Strategi Pemerintah Sri Lanka dalam Menangani Kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE). *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 1(1), 1-14. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/37819>
- Jayanti, K. (2013). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005. *Al-Turās*, 19(1), 49-70. doi:https://doi.org/10.15408/bat.v19i1.3698

- Jenkins-Smith, H., & Sabatier, P. (1994). Evaluating the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Public Policy*, 14(2), 175-203. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/4007571>
- Klitzsc, N. (2014). Disaster Politics or Disaster of Politics? Post-tsunami Conflict Transformation in Sri Langka and Aceh, Indonesia. *Cooperation and Conflict*, 49(4), 554-572.
- Lan, T. J., Patji, A. R., Soewarsono, Istiani, & Nurhasim, M. (2005). *Penyelesaian Konflik di Aceh: Aceh dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Miller, M., & Bunnell, T. (2013). Urban-Rural Connection: Banda Aceh Through Conflict, Tsunami and Desentralization. *SPRINGER ASIA SERIES*, 3(6), 83-98. doi:10.1007/978-94-007-5482-9\_6
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior. In S. P. Robbins, *Organizational Behavior* (15 ed., pp. 1-676). United States: Pearson Education.
- Rupesinghe, K. (1987). Theories of Conflict Resolution and Their Applicability To Protracted Ethnic Conflicts. *Bulletin of Peace Proposals*, 18(4), 527-539. doi:<https://doi.org/10.1177%2F096701068701800405>
- Sinulingga, A. A., Halim, A., & Nasir, P. E. (2020). Bencana dan Konflik: Pelajaran dari Aceh dan Sri Langka. *Andalas Journal of International Studi*, IX(2), 203-217. doi:<https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.%25p.2020>
- Slettebak, R. T. (2012). Don't blame the weather! Climate-related natural disasters and civil conflict. *Journal of Peace Research*, 41(3), 163-176.
- Srikandi, A. B. (2011). Proses Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Sri Langka dan Liberation Tigers of Tamil Eelam (2000-2005). *Sociae Polities*, 12(32), 36-52.
- Wahyuni, M., Isjoni, & Ibrahim, B. (2016). SEJARAH PEMBERONTAKAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DI ACEH TAHUN 1976-2005. *jurnal online mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 3(1), 1-11.
- Yani, Y. P., & Siti Mutiah Setiawati. (2018). Proses Penyelesaian Konflik Aceh Melalui MoU Helsinki: Keberhasilan Pemerintah Indonesia Membuat GAM Menerima Konsep Self Government. *Tesis*.

